

**BANGUNAN GEDUNG
TAHUN 2013
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2013**

Abstrak	: a. Dasar pembuatan Peraturan Daerah inibahwa bangunan gedung sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia karena berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya; bahwa bangunan gedung baik konstruksi maupun tata letaknya harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kehidupan masyarakat dan perlu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan; bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kabupaten Pekalongan sesuai Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu pengaturan bangunan gedung dalam Peraturan Daerah
	b. Dasar hukum pembuatan Perda : UUD 1945; UU 13 Tahun 1950; UU 5 Tahun 1960; UU 9 Tahun 1965; UU 8 Tahun 1981; UU 18 Tahun 1999; UU 28 Tahun 2002; UU 32 Tahun 2004; UU 24 Tahun 2007; UU 26 Tahun 2007; UU 28 Tahun 2009; UU 32 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2011; UU 20 Tahun 2011; PP 48 Tahun 1986; PP 4 Tahun 1988; PP 21 tahun 1988; PP 69 Tahun 1996; PP 68 Tahun 1998; PP 29 Tahun 2000; PP 36 Tahun 2005; PP 38 Tahun 2007; PP 26 Tahun 2008; PP 15 Tahun 2010; PP 27 Tahun 2012; Perda Kab Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Perda Kab Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011.
Catatan	: Perda ini mengatur tentang : a. Ketentuan Umum b. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup c. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung d. Persyaratan Bangunan Gedung e. Penyelenggaraan bangunan gedung f. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) g. Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

	<p>Bangunan dan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none">h. Pembinaani. Sanksi administratifj. Ketentuan peralihank. Ketentuan penutup <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Februari 2013</p>
--	---